



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNARKO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN
TEKNIS**
3. NHK : **109152**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.250.485.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 501 m2/98 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 381.032.000
2. Tanah Seluas 307 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 90.178.000
3. Tanah Seluas 550 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 56.959.000
4. Tanah Seluas 1080 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 143.000.000
5. Tanah Seluas 214 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 84.316.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
7. Tanah Seluas 341 m2 di KAB / KOTA KOTA BLITAR , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
8. Tanah Seluas 67 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 199.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS R MT Tahun 2021, HASIL SENDIRI



Rp. 180.000.000

3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

13.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 13.100.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 29.502.750

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 84.017.143

F. HARTA LAINNYA

Rp. 3.555.258

Sub Total

Rp. 1.580.160.151

III. HUTANG

Rp. 157.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.423.160.151

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.